



Implementasi Aplikasi Sipades 3.0 Untuk Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Aset Di Desa Kandangan

Aisyah Zarkasi^{1*}

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Email: aisyahzarkasi.22084@mhs.unesa.ac.id

Waspodo Tjipto Subroto²

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Email: waspodosubroto@unesa.ac.id

*Korespondensi: aisyahzarkasi.22084@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Histori Artikel

Dikumpulkan: 1 Februari 2026

Direvisi: 10 Februari 2026

Diterima: 15 Februari 2026

Tersedia Online: 3 Maret 2026

This study is motivated by the low transparency and accountability in village asset management due to manual recording and limited information access. It aims to analyze the acceptance of the Village Asset Management System (SIPADES 3.0) in improving transparency and accountability in Kandangan Village. The research uses a qualitative case study approach conducted in Kandangan Village, Cerme District, Gresik Regency, involving the village head, secretary, SIPADES operator, and community members. Data were collected through interviews, observation, and documentation, then analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing with triangulation. The results show that SIPADES 3.0 improves asset recording order, facilitates inventory management, and enhances reporting quality. Transparency and accountability have increased, although challenges remain in limited human resources and digital literacy. Overall, SIPADES 3.0 is effective in supporting transparent and accountable village asset management, but strengthening officials' capacity and infrastructure remains necessary.

Keywords: SIPADES 3.0, village assets, transparency, accountability.

Pendahuluan

Pengelolaan aset desa merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah desa memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola aset yang menjadi hak milik masyarakat desa. Aset desa sendiri memiliki beberapa macam golongan diantaranya berupa tanah, bangunan, jalan maupun sarana prasarana lainnya yang memiliki peran vital guna mendukung terselenggaranya potensi strategis yang dapat berperan dalam mendukung pembangunan di tingkat desa, meningkatkan kesejahteraan warga, dan memperkuat otonomi desa (Adni et al., 2024; Suhendar et al., 2022). Sesuai dengan regulasi yang tercantum dalam Permendagri Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, pemerintah desa dituntut untuk mengelola aset secara tertib administrasi, akuntabel, serta berorientasi terhadap pelayanan publik. Pengelolaan aset yang tepat tidak hanya memastikan pemanfaatan aset secara optimal, namun juga mencegah terjadinya penyalahgunaan, kehilangan, atau kerusakan aset yang dapat merugikan masyarakat desa. Dilihat dalam konteks otonomi desa, pengelolaan aset yang transparan dan akuntabel menjadi faktor utama keberhasilan dalam tata kelola pemerintahan desa (In & Financial, 2025; Junaidi & Adnan, 2023).

Transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen penting dalam pengelolaan aset desa yang berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa (Nur Arum et al., 2024).

Prinsip transparansi menuntut agar seluruh proses pengelolaan aset, mulai dari perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, hingga pelaporan dapat diketahui serta dipantau oleh masyarakat secara langsung (Safrizal et al., 2022; Suhendar et al., 2022). Sedangkan, akuntabilitas mengharuskan pemerintah desa memberikan pertanggungjawaban yang transparan atas setiap keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan aset desa (Safrizal et al., 2022; Suhendar et al., 2022). Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dapat membuka peluang terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menurunkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa (Safrizal et al., 2022; Suhendar et al., 2022). Oleh sebab itu, kedua prinsip ini menjadi prioritas utama dalam reformasi tata kelola dalam pemerintahan desa.

Namun dalam praktiknya, pengelolaan aset desa di Indonesia masih sering kali menghadapi banyak tantangan seperti ketidakakuratan pencatatan, laporan yang fiktif, kurangnya dokumentasi yang baik, serta minimnya transparansi sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dan ketidakefisienan (Nurdianti et al., 2022). Tidak jarang, aset desa dengan mudah dikuasai oleh pihak ketiga atau tidak dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat, sehingga potensi ekonomi desa tidak bisa berkembang secara maksimal (Adni et al., 2024; Nugraha et al., 2022)(Adni et al., 2024; Yusuf Eko Nahuddin, 2024). Menurut data yang dihimpun oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2025 menunjukkan bahwa sekitar lebih dari 75.266 desa di Indonesia, sekitar 21% atau 16.059 desa yang telah menyampaikan laporan inventarisasi aset. Artinya, sebanyak 59.207 desa yang belum melaporkan asetnya, sehingga hal ini mengindikasikan bahwa desa-desa tersebut belum memiliki sistem inventarisasi aset yang tertib dan terdokumentasi dengan baik, sehingga pengelolaannya cenderung tidak efisien dan berpotensi menimbulkan adanya konflik kepemilikan. Berdasarkan data Direktori Putusan Mahkamah Agung di Indonesia, menganalisis 591 putusan kasus korupsi dana aset desa periode 2014-2024 dimana lebih dari 59% korupsi dana aset desa terjadi karena laporan keuangan palsu atau laporan fiktif. Modus manipulasi laporan fiktif mendominasi pada angka 59,83%, diikuti oleh pembangunan fiktif atau proyek di bawah spesifikasi sebesar 54,49%. Seperti data yang dihimpun pada kompas.com, mengenai kasus penyalahgunaan dana aset desa yang terjadi pada tahun 2025 di Desa Jorok, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, pada hal ini ditemukan kasus korupsi dalam proses penyewaan aset desa berupa tanah kas desa yang digunakan untuk pembangunan tower telekomunikasi. Nilai sewa tanah tersebut tidak dikelola sesuai dengan ketentuan, dan sebagian dana hasil sewa digunakan untuk kepentingan pribadi aparat desa. Akibatnya, negara diperkirakan mengalami kerugian mencapai sekitar 540 juta rupiah.

Dalam konteks Desa Kandangan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, pengelolaan aset masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pencatatan aset yang masih manual dan belum akurat. Selain itu aset seperti tanah, bangunan, atau peralatan desa sering tidak terdokumentasi dengan baik, menyebabkan konflik atau bahkan kehilangan aset. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan Kasi Pemerintahan kantor Kecamatan Cerme, dapat diketahui bahwa kondisi tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak terkait, termasuk praktik korupsi, yang pada gilirannya akan menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa. Akibatnya, pendapatan ekonomi desa akan terdampak, salah satunya seperti adanya mark up anggaran pada alokasi dana aset desa yang digunakan pada pengadaan pavingisasi jalan tani desa.

Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dalam sistem pengelolaan aset desa guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat, sehingga dana aset desa dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kemajuan desa. Dalam mengatasi berbagai hambatan tersebut, Kementerian Dalam Negeri memperkenalkan aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES), yang saat ini telah berkembang hingga tahap versi terbaru di 3.0. Perkembangan teknologi informasi memberikan peluang besar untuk meningkatkan kualitas pengelolaan aset desa. Aplikasi ini hadir sebagai inovasi digitalisasi aset serta kerangka kerja sistematis yang memfasilitasi pemerintah desa guna penginputan, inventarisasi, pengadaan, pencatatan, serta pelaporan aset dengan lebih mudah, cepat, akurat, dan transparan (Safitri, 2023a).

SIPADES menyediakan kerangka kerja yang sistematis dan terintegrasi, sehingga data aset dapat dikelola secara lebih akurat, real-time, dan mudah diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan (Adni et al., 2024; Nugraha et al., 2022; Rachmawati & Prapanca, 2024). Dengan adanya aplikasi SIPADES 3.0, informasi mengenai aset desa dengan digitalisasi data aset dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat, sehingga dapat mendorong partisipasi warga dalam pengawasan pengelolaan aset desa (Nugraha et al., 2022). Selain itu, aplikasi SIPADES juga dapat memberikan bantuan kepada pemerintah desa dalam melakukan pencatatan dan pelaporan aset secara lebih efisien dan akurat (Rachmawati & Prapanca, 2024). Implementasi aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) 3.0 diharapkan dapat menjadi jawaban bagi permasalahan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset di Desa Kandangan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Melalui aplikasi SIPADES, masyarakat dapat memperoleh informasi terkait status aset desa secara lebih terbuka, sementara pemerintah desa memiliki instrumen tepat untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan kebijakan pengelolaan aset (Ediyanto & Mona indrianie, 2023a).

Desa Kandangan sebagai salah satu desa yang telah menerapkan SIPADES 3.0, menjadi relevan karena sedang menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan aset desa yaitu kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pencatatan dan pengelolaan asetnya. Hal ini sangat penting, mengingat desa memiliki peran yang strategis dalam pembangunan, sehingga pengelolaan aset yang baik akan berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat desa (Freitasl & Costa, 2022). Beberapa penelitian yang sudah ada menjelaskan bahwa implementasi aplikasi SIPADES memberikan dampak yang positif terhadap pengelolaan aset desa. Misalnya, hasil penelitian di Desa Pendem menyebutkan bahwa penerapan SIPADES mendukung keterbukaan informasi, akuntabilitas, serta ketertiban administrasi aset (Nurdianti et al., 2022). Hal ini sejalan dengan studi lain yang menegaskan bahwa SIPADES mampu meminimalkan resiko kehilangan aset akibat lemahnya pencatatan manual. Meskipun demikian, keberhasilan implementasi SIPADES tidak lepas dari tantangan teknis dan non-teknis. Menurut (Sosial et al., n.d.), beberapa desa masih menghadapi keterbatasan SDM, kurangnya literasi digital perangkat desa, serta infrastruktur teknologi yang belum merata. Dari hasil penelitian lainnya dapat diidentifikasi pula bahwa terjadi hambatan pada implementasi SIPADES di Desa Tanjungsari, seperti kurangnya pelatihan/pendampingan, keterbatasan SDM (belum mahir), dan masalah jaringan internet (Ediyanto Ediyanto & Mona indrianie, 2023a).

Penelitian-penelitian yang sudah ada telah mengidentifikasi manfaat dan kendala SIPADES, namun belum ada studi yang mendalam dan spesifik mengenai penerimaan implementasi SIPADES 3.0 dari perspektif TAM dan bagaimana aplikasi ini secara langsung

memberikan peningkatan pada kualitas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset di Desa Kandangan, terutama dalam mengatasi permasalahan yang ada. Kesenjangan ini mengindikasikan pemahaman bagaimana faktor-faktor tata kelola dan kompetensi berinteraksi dalam konteks implementasi SIPADES untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas yang optimal masih belum lengkap, terutama dalam menghadapi kompleksitas lingkungan pemerintahan desa. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menawarkan kebaruan yang signifikan. Penelitian mengenai implementasi SIPADES 3.0 di Desa Kandangan diharapkan dapat memberikan gambaran empiris terkait manfaat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di Desa Kandangan melalui digitalisasi aset. Hal ini penting mengingat kedua aspek tersebut merupakan prinsip utama dalam *good governance* sekaligus menjadi tuntutan masyarakat terhadap pemerintah desa. Sehingga, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah desa maupun instansi terkait untuk meningkatkan kualitas tata kelola aset desa. Kondisi ini menjadikan penelitian mengenai efektivitas penerapan SIPADES di setiap desa, khususnya Desa Kandangan, menjadi sangat penting. Karena pengelolaan aset desa yang transparan dan akuntabel adalah pondasi awal untuk mencegah korupsi, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya desa, menumbuhkan kepercayaan publik sekaligus mendukung terciptanya pembangunan desa yang berkelanjutan (Rinto Z.W. Abidjulu et al., 2024).

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengeksplorasi penerimaan aplikasi SIPADES 3.0 di Desa Kandangan dan menganalisis dampak yang diberikan pada kualitas peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menyajikan rekomendasi bagi pengembangan aplikasi dan pengelolaan aset desa yang lebih baik di masa depan. Selanjutnya, penelitian ini juga diharapkan mampu berkontribusi dalam memperkaya literatur mengenai digitalisasi tata kelola aset desa. Dengan adanya transformasi digital seperti aplikasi SIPADES 3.0 ini, desa bukan sekedar menjadi objek pembangunan, tetapi juga mampu untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan asetnya secara profesional, transparan, dan akuntabel bagaimana sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Darmawan et al., 2022).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus di Desa Kandangan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, selama November–Desember 2025. Informan penelitian meliputi operator SIPADES 3.0 dan masyarakat desa yang terlibat dalam penggunaannya, dipilih melalui purposive sampling dan snowball sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik serta pelaksanaan penelitian yang berpedoman pada etika penelitian.

Hasil

Reduksi data

Tabel 1. Hasil Reduksi Data Penelitian

No	Sumber Data	Data Mentah	Hasil Reduksi
1	Kepala Desa	SIPADES membantu tertib administrasi aset dan pengambilan keputusan berbasis data	SIPADES meningkatkan tata kelola aset dan efektivitas manajerial

2	Sekretaris Desa	Data aset lebih mudah dicari, pelaporan menjadi lebih cepat dan fleksibel	Kemudahan akses data dan efisiensi pelaporan
3	Operator SIPADES	Awal sulit, sekarang terbiasa dan terkesan mudah penggunaannya	Adaptasi teknologi, perceived ease of use meningkat seiring pengalaman
4	Kaur Keuangan	Laporan lebih rapi dan memudahkan sinkronisasi dengan laporan keuangan	Akuntabilitas administratif meningkat
5	Masyarakat 1 (IW-M1)	Aset desa sekarang sering dibahas di musdes lewat aplikasi SIPADES, lebih terbuka	Transparansi meningkat
6	Masyarakat 2 (IW-M2)	Akuntabilitas pemerintah desa terhadap aset desa sejak penggunaan aplikasi ini lebih detail dan rinci	Transparansi dan akuntabilitas meningkat
7	Masyarakat 3 (IW-M3)	Melihat aset desa melalui SIPADES 3.0, banner, website, media sosial memberikan kemudahan, anak muda ikut andil dalam menjaga aset desa	Transparansi dan partisipasi meningkat
8	Masyarakat 4 (IW-M4)	Aset desa sekarang sering dibahas dan lebih terbuka, namun akses SIPADES agak rumit jika pertama kali	Dampak tidak langsung, perlu sosialisasi
9	Masyarakat 5 (IW-M5)	Tidak bisa pakai aplikasi, tapi tidak merasa ketinggalan informasi karena ada cara lain	Transparansi multi-channel penting untuk inklusivitas
10	Masyarakat 6 (IW-M6)	Melihat aset desa melalui SIPADES 3.0, sering dibahas pada waktu pertemuan PKK, mudah memantau	Transparansi dan akuntabilitas meningkat
11	Masyarakat 7 (IW-M7)	Mengetahui segala kegiatan aset desa melalui aplikasi ini sangat menyenangkan, butuh waktu untuk belajar	Transparansi meningkat, literasi digital penting
12	Masyarakat 8 (IW-M8)	Melihat aset desa melalui SIPADES 3.0, banner, website, media sosial untuk mengetahui keadaan aset desa	Transparansi meningkat
13	Masyarakat 9 (IW-M9)	Aset desa sekarang sering dibahas dan lebih terbuka melalui rapat forum atau musdes	Transparansi meningkat
14	Masyarakat 10 (IW-M10)	Penggunaan aplikasi SIPADES 3.0 untuk memantau aset, namun belum tahu benar isi aplikasi tersebut secara rinci	Transparansi meningkat, namun ada kendala pemahaman

15	Masyarakat 11 (IW-M11)	Pemaparan aset lebih jelas setelah penggunaan aplikasi SIPADES 3.0, berbeda dengan sebelumnya, bisa dikatakan hal tentang aset desa minim dibahas	Transparansi dan akuntabilitas meningkat signifikan
16	Observasi	Data diinput lewat komputer desa, penyimpanan dokumen aset fisik tertata rapi, dokumen non-fisik tersimpan dengan baik di aplikasi, masyarakat dapat mengawasi aset melalui aplikasi tersebut	Implementasi nyata SIPADES, dokumentasi lengkap
17	Dokumentasi	Laporan aset tahunan dari SIPADES 3.0, buku aset manual	Bukti penggunaan sistem dan perbandingan dengan sistem manual

Penyajian data (data display)

Tabel 2. Display Data Implementasi SIPADES 3.0 Berdasarkan TAM

Komponen TAM	Temuan Lapangan	Kesesuaian dengan Teori
<i>Perceived Usefulness</i>	SIPADES 3.0 mempermudah pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan aset; mendukung pengambilan keputusan berbasis data	Sesuai: Aparatur desa meyakini SIPADES 3.0 bermanfaat meningkatkan efektivitas kerja
<i>Perceived Ease of Use</i>	Awalnya sulit, namun dengan pelatihan dan pengalaman, menjadi lebih mudah, masih ada aparaturnya dan masyarakat yang merasa kesulitan	Sesuai: Kemudahan penggunaan meningkat seiring pengalaman, namun literasi digital memengaruhi persepsi
<i>Attitude Toward Use</i>	Aparatur desa mendukung dan berkomitmen menggunakan SIPADES 3.0	Sesuai: Sikap positif terbentuk dari perceived usefulness dan ease of use
<i>Behavioral Intention</i>	Digunakan secara berkelanjutan, ada rencana melatih lebih banyak aparaturnya dan memberikan sosialisasi rutin untuk masyarakat	Sesuai: Niat menggunakan tinggi, didukung oleh kebijakan dan komitmen pimpinan
<i>Actual Technology Use</i>	Pelaporan tahunan, input data rutin, integrasi dengan Siskeudes	Sesuai: Penggunaan aktual terwujud dalam aktivitas sehari-hari

Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Berdasarkan hasil reduksi dan penyajian data yang diverifikasi melalui triangulasi sumber dan teknik, implementasi SIPADES 3.0 di Desa Kandangan dapat dijelaskan melalui kerangka *Technology Acceptance Model* (TAM). Pertama, *perceived usefulness* terlihat dari persepsi aparaturnya desa bahwa SIPADES 3.0 meningkatkan efisiensi kerja, akurasi data, dan kualitas pelaporan, sehingga mendukung kinerja pengelolaan aset desa (King & He, 2006;

Malatji et al., 2020). Kedua, *perceived ease of use* menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan dirasakan terutama oleh operator yang telah memperoleh pelatihan (Granić & Marangunić, 2019), sedangkan aparatur yang belum mendapat pelatihan masih mengalami kesulitan, sehingga pengalaman dan dukungan teknis menjadi faktor penting dalam penerimaan sistem (Al-Bukhrani et al., 2025).

Ketiga, *attitude toward using technology* tercermin dari sikap positif aparatur desa, khususnya pimpinan desa, yang menunjukkan komitmen untuk terus memanfaatkan SIPADES 3.0 dalam pengelolaan aset (King & He, 2006). Keempat, *behavioral intention to use* ditunjukkan melalui rencana pemerintah desa untuk meningkatkan infrastruktur, mengadakan pelatihan lanjutan, serta mengintegrasikan sistem dengan aplikasi lain, yang juga dipengaruhi oleh dukungan kebijakan pemerintah daerah (Adnan et al., 2025; Kamal et al., 2020). Kelima, *actual technology use* terlihat dari penggunaan SIPADES 3.0 secara rutin dalam penginputan data, pemeliharaan sistem, dan penyusunan laporan aset desa. Konsistensi temuan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi memperkuat validitas analisis implementasi SIPADES 3.0 dalam perspektif TAM.

Implementasi SIPADES 3.0 di Desa Kandangan terbukti meningkatkan transparansi pengelolaan aset desa dalam beberapa dimensi. Pertama, ketersediaan informasi, dimana sistem menyediakan data aset yang lengkap, terstruktur, dan mudah ditelusuri sehingga mendukung keterbukaan informasi publik sebagai fondasi transparansi pemerintahan (Grimmelikhuijsen et al., 2017). Kedua, aksesibilitas informasi, yang dilakukan melalui berbagai saluran seperti website desa, media sosial, banner, dan forum musyawarah desa sehingga informasi dapat menjangkau masyarakat secara lebih inklusif (Murmman & Fischer-Hübner, 2017; Ortega-Rodríguez et al., 2020).

Ketiga, kejelasan dan akurasi informasi, dimana SIPADES 3.0 menyajikan data dengan format standar yang dilengkapi foto dan spesifikasi aset sehingga mudah dipahami serta mendukung fungsi pengawasan masyarakat (Understanding & Perspectives, 2007). Keempat, transparansi proses, karena sistem mencatat setiap tahapan pengelolaan aset melalui fitur *log activity* sehingga proses dapat ditelusuri dan diverifikasi, yang berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas (Mabillard & Zumofen, 2017).

Namun demikian, transparansi yang terwujud masih bersifat informatif dan belum sepenuhnya partisipatif, karena masyarakat masih berperan sebagai penerima informasi pasif. Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi masih berada pada level *usable transparency* dan belum mencapai *actionable transparency* yang memungkinkan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan (Murmman & Fischer-Hübner, 2017). Validitas temuan diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik, yaitu dengan membandingkan persepsi aparatur desa dan masyarakat serta melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Implementasi SIPADES 3.0 terbukti meningkatkan akuntabilitas pengelolaan aset desa di Desa Kandangan dalam tiga dimensi utama. Pertama, akuntabilitas administratif, dimana sistem menyediakan format laporan standar sesuai regulasi, dokumentasi aset yang lengkap disertai foto dan dokumen pendukung, serta jejak audit melalui fitur *log activity* (Stewart et al., 2023). Hal ini mendukung mekanisme pelaporan yang terstruktur dan dapat diverifikasi (Kumar, 2016). Kedua, akuntabilitas manajerial, karena SIPADES 3.0 membantu pengambilan keputusan berbasis data, memudahkan pemantauan kondisi aset, serta terintegrasi dengan sistem keuangan desa sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset (Nozari et al., 1986).

Ketiga, akuntabilitas publik, yang terlihat dari keterbukaan informasi kepada masyarakat serta pertanggungjawaban pemerintah desa dalam forum publik, sehingga

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa (Imawan et al., 2019). Selain itu, peningkatan akuntabilitas juga berkaitan erat dengan transparansi, karena keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa, yang pada akhirnya mendorong praktik pemerintahan yang lebih akuntabel (Mabillard & Zumofen, 2017). Validitas temuan diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik, yaitu wawancara dengan aparatur dan masyarakat, observasi pengoperasian sistem, serta dokumentasi laporan dan fitur sistem.

Analisis data menunjukkan bahwa implementasi SIPADES 3.0 dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi komitmen kepemimpinan Kepala Desa dan Sekretaris Desa, dukungan kebijakan dari pemerintah kabupaten, pelatihan serta pendampingan dari pihak kecamatan, ketersediaan infrastruktur teknologi yang relatif memadai, serta tingginya persepsi kegunaan sistem oleh aparatur desa dan masyarakat. Sementara itu, faktor penghambat yang ditemukan antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan literasi digital, ketergantungan pada satu operator dalam pengelolaan sistem, kendala teknis seperti jaringan internet yang tidak stabil dan bug pada sistem, tingkat literasi digital masyarakat yang beragam, serta sosialisasi penggunaan sistem yang masih belum optimal.

Identifikasi faktor-faktor tersebut penting sebagai dasar dalam merumuskan rekomendasi perbaikan implementasi SIPADES 3.0 di tingkat desa. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SIPADES dipengaruhi oleh aspek kepemimpinan, kapasitas sumber daya manusia, dukungan kelembagaan, serta kesiapan infrastruktur teknologi (Ediyanto Ediyanto & Mona indrianie, 2023) dan (Safitri, 2023).

Diskusi

Implementasi sipades 3.0 dalam perspektif technology acceptance model

Hasil penelitian mengonfirmasi bahwa *Technology Acceptance Model* (TAM) relevan dalam menjelaskan penerimaan dan penggunaan SIPADES 3.0 oleh aparatur Desa Kandungan, sebagaimana ditunjukkan oleh konsistensi kemampuan prediktif TAM dalam berbagai konteks organisasi dan teknologi (King & He, 2006). Temuan menunjukkan bahwa *perceived usefulness* menjadi prediktor utama penerimaan sistem, karena aparatur desa merasakan manfaat nyata berupa efisiensi operasional, peningkatan akurasi data, serta dukungan pengambilan keputusan berbasis data (Granić & Marangunić, 2019). Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa kualitas sistem dan kualitas informasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna SIPADES (Rabiatul et al., 2020).

Selain itu, *perceived ease of use* bersifat dinamis dan meningkat seiring pengalaman penggunaan, pelatihan, dan dukungan teknis. Proses pelatihan bertahap, praktik langsung (*learning by doing*), serta dukungan komunitas pengguna membantu aparatur desa beradaptasi dengan sistem, meskipun kesenjangan literasi digital masih menjadi tantangan (Feng et al., 2021). Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan literasi digital merupakan hambatan umum dalam implementasi SIPADES di tingkat desa (Ediyanto Ediyanto & Mona indrianie, 2023).

Penelitian ini juga menemukan bahwa dukungan organisasi dan kebijakan berperan penting sebagai faktor eksternal yang memperkuat penerimaan teknologi, melalui kebijakan mandatori, dukungan teknis, komitmen kepemimpinan, serta penyediaan sumber daya infrastruktur (Kamal et al., 2020). Secara teoritis, temuan ini memperkuat relevansi TAM dalam konteks pemerintahan desa, sekaligus menegaskan pentingnya integrasi faktor

kontekstual seperti literasi digital, pelatihan, dukungan organisasi, dan kebijakan dalam memahami adopsi teknologi di sektor publik.

Peran sipades 3.0 dalam meningkatkan transparansi: dari informatif menuju partisipatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPADES 3.0 berhasil meningkatkan transparansi pengelolaan aset desa di Desa Kandangan melalui empat dimensi utama, yaitu ketersediaan informasi, aksesibilitas informasi, kejelasan informasi, dan transparansi proses. Temuan ini sejalan dengan konsep transparansi pemerintahan yang menekankan keterbukaan informasi sebagai prinsip utama dalam tata kelola publik modern (Grimmelikhuijsen et al., 2017).

Sebelum penerapan SIPADES 3.0, transparansi pengelolaan aset desa masih bersifat transparansi nominal, yaitu penyampaian informasi yang terbatas pada kewajiban administratif dan sulit diakses masyarakat. Informasi aset biasanya hanya disampaikan dalam laporan tahunan dengan format yang kurang standar dan sulit dipahami. Setelah implementasi SIPADES 3.0, transparansi meningkat menjadi transparansi usable, dimana informasi aset tersedia secara digital, terstruktur, serta dapat diakses melalui berbagai media seperti aplikasi SIPADES, website desa, media sosial, banner informasi, dan forum musyawarah desa. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa transparansi yang efektif tidak hanya membuka data, tetapi juga memastikan data tersebut dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh masyarakat (Matheus & Janssen, 2020).

Penelitian ini juga menemukan bahwa pendekatan multi-channel menjadi strategi penting untuk mewujudkan transparansi yang inklusif. Pemerintah desa tidak hanya menggunakan media digital seperti aplikasi SIPADES dan website desa, tetapi juga memanfaatkan media konvensional seperti banner, papan informasi, dan forum musyawarah desa. Strategi ini membantu mengatasi kesenjangan digital masyarakat yang memiliki tingkat literasi teknologi yang berbeda (Kurniawan & Witono, 2023).

Meskipun demikian, transparansi yang dicapai masih berada pada tahap *usable* dan belum sepenuhnya mencapai transparansi *actionable*, yaitu kondisi dimana masyarakat dapat menggunakan informasi untuk melakukan tindakan nyata seperti memberikan masukan, pengawasan, atau pengaduan. Beberapa kendala yang masih ditemukan antara lain keterbatasan literasi digital masyarakat, akses langsung ke sistem yang masih terbatas, sosialisasi yang belum optimal, serta partisipasi masyarakat yang relatif rendah (Murmman & Fischer-Hübner, 2017).

Secara keseluruhan, temuan ini memperkuat penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa SIPADES mampu meningkatkan keterbukaan informasi dan ketertiban administrasi aset desa, sekaligus menegaskan pentingnya penguatan partisipasi masyarakat agar transparansi dapat berkembang dari sekadar informatif menjadi partisipatif (Nurdianti et al., 2022).

Peran sipades 3.0 dalam meningkatkan akuntabilitas: administratif, manajerial, dan publik

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPADES 3.0 di Desa Kandangan dapat dijelaskan dengan baik melalui kerangka *Technology Acceptance Model* (TAM) yang diperkenalkan oleh Fred D. Davis. Model ini menjelaskan bahwa penerimaan suatu sistem teknologi oleh pengguna dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan. Dalam praktik implementasinya, komponen-komponen TAM tampak secara nyata dalam penggunaan SIPADES oleh aparatur desa.

Perceived Usefulness atau persepsi kegunaan terlihat dari keyakinan aparaturnya bahwa penggunaan SIPADES 3.0 mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan aset desa. Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan menilai bahwa sistem ini membantu proses pencatatan, pengelompokan, serta pelaporan aset desa menjadi lebih sistematis dan akurat sehingga meminimalkan kesalahan administrasi. Persepsi ini mendorong aparaturnya untuk memanfaatkan sistem secara lebih optimal karena mereka merasakan manfaat langsung terhadap peningkatan kinerja administrasi desa.

Selain itu, *Perceived Ease of Use* atau persepsi kemudahan penggunaan juga terlihat dari pengalaman aparaturnya dalam mengoperasikan aplikasi SIPADES 3.0. Sistem ini dinilai cukup mudah dipahami setelah dilakukan pelatihan dan pendampingan, sehingga aparaturnya dapat menyesuaikan diri dengan penggunaan teknologi tersebut dalam pekerjaan sehari-hari. Kemudahan dalam navigasi menu serta proses input data membuat aparaturnya tidak mengalami kesulitan berarti dalam mengelola data aset secara digital.

Dengan demikian, penerimaan aparaturnya terhadap SIPADES 3.0 tidak hanya dipengaruhi oleh faktor teknis sistem, tetapi juga oleh persepsi mereka terhadap manfaat dan kemudahan penggunaan sistem tersebut. Kedua faktor ini menjadi pendorong utama dalam membentuk sikap positif aparaturnya terhadap penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa.

Kontribusi terhadap good governance di tingkat desa

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPADES 3.0 berkontribusi signifikan dalam memperkuat prinsip *good governance* di tingkat desa, khususnya pada aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan aset. Hal ini sejalan dengan konsep *good governance* dari World Bank yang menekankan pengelolaan sumber daya publik secara transparan, akuntabel, dan efisien untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Temuan ini juga konsisten dengan penelitian Ediyanto Ediyanto dan Mona Indrianie (2023) yang menyatakan bahwa SIPADES mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa. Namun, efektivitas teknologi tersebut tetap bergantung pada komitmen kepemimpinan desa, dukungan kebijakan pemerintah daerah, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, serta strategi komunikasi dan sosialisasi yang inklusif agar masyarakat mampu memanfaatkan informasi aset desa secara optimal.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi SIPADES 3.0 di Desa Kandangan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pengelolaan aset desa. Aparaturnya menunjukkan penerimaan teknologi yang baik sebagaimana dijelaskan dalam perspektif *Technology Acceptance Model (TAM)*, karena aplikasi ini dinilai bermanfaat dalam mendukung pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan aset secara lebih sistematis. Penggunaan sistem digital menggantikan pencatatan manual yang sebelumnya kurang tertib, sehingga pengelolaan aset menjadi lebih terstruktur, terdokumentasi, dan terintegrasi. Penerapan SIPADES 3.0 juga meningkatkan transparansi melalui keterbukaan informasi aset desa kepada masyarakat serta memperkuat akuntabilitas administratif, manajerial, dan publik dalam pengelolaan aset. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, literasi digital aparaturnya, dan dukungan infrastruktur teknologi. Oleh karena itu, SIPADES 3.0 dinilai efektif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset desa, namun tetap

memerlukan penguatan kapasitas aparatur serta dukungan berkelanjutan agar penerapannya dapat berjalan optimal.

Referensi

- Adnan, A., Irvine, R. E., Williams, A., Harris, M., & Antonacci, G. (2025). Improving Acceptability of mHealth Apps—The Use of the Technology Acceptance Model to Assess the Acceptability of mHealth Apps: Systematic Review. *Journal of Medical Internet Research*, 27. <https://doi.org/10.2196/66432>
- Adni, D. F., Shasrini, T., & Fadzil, F. (2024). International community service collaboration: Recommendations for village asset management in Kedah, Malaysia. *Journal of Community Service and Empowerment*, 5(2), 383–391. <https://doi.org/10.22219/jcse.v5i2.29503>
- Al-Bukhrani, M. A., Alrefaee, Y. M. H., & Tawfik, M. (2025). Adoption of AI writing tools among academic researchers: A Theory of Reasoned Action approach. *PLoS ONE*, 20(1 January), 1–25. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0313837>
- Darmawan, A. K., Umam, B. A., Ali, I., Setyawan, M. B., Muhsi, M., & Anwari, A. (2022). Assistance for Village Officials in the Implementation of Gis-Based Digital Asset Digitization in Durbuk Village, Pademawu District, Pamekasan Regency. *International Journal of Engagement and Empowerment (IJE2)*, 2(3), 246–258. <https://doi.org/10.53067/ije2.v2i3.76>
- Ediyanto Ediyanto, & Mona indrianie. (2023a). Analisis Penerapan Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Tanjungsari Kabupaten Sumedang. *Journal of Administrative and Social Science*, 4(1), 165–171. <https://doi.org/10.55606/jass.v4i1.136>
- Ediyanto Ediyanto, & Mona indrianie. (2023b). Analisis Penerapan Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Tanjungsari Kabupaten Sumedang. *Journal of Administrative and Social Science*, 4(1), 165–171. <https://doi.org/10.55606/jass.v4i1.136>
- Feng, G. C., Su, X., Lin, Z., He, Y., Luo, N., & Zhang, Y. (2021). Determinants of Technology Acceptance: Two Model-Based Meta-Analytic Reviews. *Journalism and Mass Communication Quarterly*, 98(1), 83–104. <https://doi.org/10.1177/1077699020952400>
- Freitasl, A. da C., & Costa, H. da. (2022). Enhancing Community Welfare: Analysis of Village Fund Management in the Socio-Economic Sector. *Law and Economics*, 16(1), 15–29. <https://doi.org/10.35335/laweco.v16i1.49>
- Granić, A., & Marangunić, N. (2019). Technology acceptance model in educational context: A systematic literature review. *British Journal of Educational Technology*, 50(5), 2572–2593. <https://doi.org/10.1111/bjet.12864>
- Grimmelikhuijsen, S., Weske, U., Bouwman, R., & Tummers, L. (2017). Public sector transparency. *Experiments in Public Management Research: Challenges and Contributions*, (September 2007), 291–312. <https://doi.org/10.1017/9781316676912.014>
- Imawan, A., Irianto, G., & Prihatiningtias, Y. W. (2019). Peran Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Kepercayaan Publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1). <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10009>

- In, A., & Financial, V. (2025). *International Journal of Economics , Accounting , and Management Systematic Literature Review (SLR): Transparency And*. 1(5), 309–314.
- Junaidi, D., & Adnan, M. F. (2023). *JIEE* : 3(2), 1–11.
- Kamal, S. A., Shafiq, M., & Kakria, P. (2020). Investigating acceptance of telemedicine services through an extended technology acceptance model (TAM). *Technology in Society*, 60(November 2019), 101212. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2019.101212>
- King, W. R., & He, J. (2006). A meta-analysis of the technology acceptance model. *Information and Management*, 43(6), 740–755. <https://doi.org/10.1016/j.im.2006.05.003>
- Kumar, R. (2016). Assessing Accountability. *Rethinking Revolutions*, 13(4), 273–304. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199465330.003.0009>
- Kurniawan, D. A., & Witono, B. (2023). Village Government Accountability and Transparency in Village Financial Management. *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 7(2), 331–344. <https://doi.org/10.36555/jasa.v7i2.2291>
- Mabillard, V., & Zumofen, R. (2017). The complex relationship between transparency and accountability: A synthesis and contribution to existing frameworks. *Public Policy and Administration*, 32(2), 110–129. <https://doi.org/10.1177/0952076716653651>
- Malatji, W. R., van Eck, R., & Zuva, T. (2020). Understanding the usage, modifications, limitations and criticisms of technology acceptance model (TAM). *Advances in Science, Technology and Engineering Systems*, 5(6), 113–117. <https://doi.org/10.25046/aj050612>
- Matheus, R., & Janssen, M. (2020). A Systematic Literature Study to Unravel Transparency Enabled by Open Government Data: The Window Theory. *Public Performance and Management Review*, 43(3), 503–534. <https://doi.org/10.1080/15309576.2019.1691025>
- Murmann, P., & Fischer-Hübner, S. (2017). Tools for Achieving Usable Ex Post Transparency: A Survey. *IEEE Access*, 5, 22965–22991. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2017.2765539>
- Nozari, A., Lalli, J. C., & Kumin, H. (1986). A random walk approximation for a solar energy storage system. *Solar Energy*, 37(2), 127–134. [https://doi.org/10.1016/0038-092X\(86\)90070-8](https://doi.org/10.1016/0038-092X(86)90070-8)
- Nugraha, B., Mafturrahman, M., Elshifa, A., Putri, N. A., & Fitriani, S. (2022). Implementation of the Village Asset Management System Policy in Realizing Good Governance in Pekalongan Regency. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 14(2), 159–168. <https://doi.org/10.15575/jpan.v14i2.21155>
- Nur Arum, P. W., Budi Santoso, S. E., Hariyanto, E., & Wibowo, H. (2024). The Effect Of Accountability And Transparency Of Fund Management On Village Government Trust In Paguyangan Brebes Sub-District. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 5(4), 1359–1371. <https://doi.org/10.59141/jist.v5i4.1011>
- Nurdianti, R. R., Sasanti, E. E., & Lenap, I. P. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) Di Pemerintah Desa Pendem. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(4), 784–792. <https://doi.org/10.29303/risma.v2i4.338>
- Ortega-Rodríguez, C., Licerán-Gutiérrez, A., & Moreno-Albarracín, A. L. (2020). Transparency as a key element in accountability in non-profit organizations: A

- systematic literature review. *Sustainability (Switzerland)*, 12(14). <https://doi.org/10.3390/su12145834>
- Rabiatul, Mariah, Q., & Raharso. (2020). Evaluasi Kesuksesan Implementasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) Implementation Success Evaluation of Village Asset Management System (SIPADES). *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas*, 4(1), 33–42.
- Rachmawati, E., & Prapanca, D. (2024). Table Of Content Article information. *Rechtsidee. Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 14(2), 6–14.
- Rinto Z.W. Abidjulu, Feliks Arfid Guampe, & Join Hengkeng. (2024). Peran Kepala Desa dalam Mewujudkan Pembangunan Desa yang Berkelanjutan: Sebuah Studi Literatur Kasus-kasus di Indonesia. *WISSEN : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 272–285. <https://doi.org/10.62383/wissen.v2i2.351>
- Safitri, I. (2023a). Implementasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) di Kecamatan Bengkalis. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 2(4), 94–102.
- Safitri, I. (2023b). Implementasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) di Kecamatan Bengkalis. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 2(4), 94–102.
- Safrizal, S., Taufik, T., & Basri, Y. M. (2022). Good Governance on Village Fund Management with The Use of Information Technology as A Moderating Variable. *Indonesian Journal of Economics, Social, and Humanities*, 4(1), 15–28. <https://doi.org/10.31258/ijesh.4.1.15-28>
- Sosial, J., Ramdani, R., Talitha, N. S., Renaldi, F., & Santikarama, I. (n.d.). *Perencanaan Strategis Sistem Informasi Desa di Kabupaten Bandung Barat Menggunakan Kerangka Kerja Togaf ADM*. 5(6), 3140–3157.
- Stewart, V. R., Snyder, D. G., & Kou, C. Y. (2023). We Hold Ourselves Accountable: A Relational View of Team Accountability. *Journal of Business Ethics*, 183(3), 691–712. <https://doi.org/10.1007/s10551-021-04969-z>
- Suhendar, H., Iskandar, J., Kurniadi, D., & Septiana, Y. (2022). Asset Management System Design of Village Based on Geographic Information System. *Jurnal Teknik Informatika (Jutif)*, 3(4), 815–819. <https://doi.org/10.20884/1.jutif.2022.3.4.299>
- Understanding, M. S., & Perspectives, T. (2007). *r Fo Pe er Re vi r Fo Pe er Re vi*. 54, 338–343.
- Yusuf Eko Nahuddin. (2024). Barriers To Village Asset Management And Regional Government Policies In Overcoming Them. *International Journal of Sociology and Law*, 1(2), 114–127. <https://doi.org/10.62951/ijsl.v1i2.58>